

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM. 2005).
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, Surabaya: Refika Aditama, 2007.
- , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Ali, H.Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Anwar, HAK. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung : Alumni. 1982.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Enam. 1996.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita Cetakan Ketiga Puluh, Jakarta, 1999
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Bruggink, J.J. H. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: Penerbit Putra Utama Offset. 2014.

153

Didi Mujahari, 2021

PEMENUHAN UNSUR PEMALSUAN GIRIK C DAN SPPT PBB YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn. Jkt. Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id.www.library.upnvj.ac.id.www.repository.upnvj.ac.id]

- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2003.
- , *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo. 2000.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum pendekatan Kontemporer*, (PT. Cintra Bandung : Adytia Bakti. 2002.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Hartanti, Evi *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1999.
- Hatta, Muhammad. *Hukum Tanah Nasional, Dalam perspektif Negara Kesatuan, Hukum Tanah: Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kejahatan dan Perseteruan Bangsa*, Yogyakarta : Media Abadi, 2005.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pidana Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Pren Media. 2008.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius. 1992.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. 2013.
- , *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico. 1984.
- Manulang, Rinto. *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Jakarta: Penerbit Buku Pintar. 2011.
- Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2005.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1979.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni. 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta. 1993.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Muladi, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Penerbit Fakultas Hukum Diponegoro, 1984.
- M. Friedman, Lawrence. *American Law an Introduction*, Terjemahan Wisma Bhakti. Jakarta: PT. Tata Nusa. 2001.
- Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Bandar Madju, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco. 1980.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.
- Rohmad, Abu. *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Semarang : Walisongo Press, 2008.
- Saherodji, H. Hari. *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru. 2008.
- Sutedi, Adrian. *Sertifikat hak atas tanah*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. 2010.
- Shidarta, Darji Darmadiharjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia

155

Didi Mujahari, 2021

PEMENUHAN UNSUR PEMALSUAN GIRIK C DAN SPPT PBB YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn. Jkt. Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id.www.library.upnvj.ac.id.www.repository.upnvj.ac.id]

- Pustaka Utama. 1995.
- Sianturi, S.R.. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Indonesia*, Surabaya: Arloka, 2003.
- Solly Lubis, Muhammad. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 1994.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Syarifudin Hidayat, Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tiara Ltd. 1959.
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1980
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta:Sinar Grafika. 2004.
- Whillan, Douglas J. *The Torren System In Australia*, Brisbane Perth : Sydney Melbourne, 1982.
- Wingnyosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

156

Didi Mujahari, 2021

PEMENUHAN UNSUR PEMALSUAN GIRIK C DAN SPPT PBB YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn. Jkt. Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id.www.library.upnvj.ac.id.www.repository.upnvj.ac.id]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Surat Direktur Jenderal Pajak, tanggal 27 Maret 1993, Nomor : SE-15/ PJ.G/1993, tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB II)

C. Jurnal, Makalah Dan Internet.

Moh. Mahfud MD, Amandemen UUPA No. 5 Tahun 1960: Dalam Perspektif Politik Hukum”, dalam Semiloka Nasional Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UII dan DPD, Yogyakarta, 24 Maret 2006;

Oloan Sitorus, *Penataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah dalam Amandemen UUPA*, dalam Semiloka Nasional Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, UII dan DPD RI, 24 Maret 2006;

<http://www.omtanah.com/detail.asp?id,>“Jenis-jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah”, akses 19 agustus 2018.

Jurnal Repertorium, Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Leter C, Girik Dan Petuk D

157

Didi Mujahari, 2021

PEMENUHAN UNSUR PEMALSUAN GIRIK C DAN SPPT PBB YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn. Jkt. Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id.www.library.upnvj.ac.id.www.repository.upnvj.ac.id]

Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, ditulis oleh Sri Wahyuni dan Paus Tri Wahyudi.

Diponegoro Law Jurnal, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah antara PT. Maligi Estate melawan Perorangan ISSN:23389-26384, Volume 5 No. 3 2016, ditulis oleh Astri Astariana dan Ana Silviana

Jurnal Hukum Adigama, Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Atas Tanah Berdasarkan Uupa Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Terkait Penggunaan Girik Nomor 87 Persil 157 Kelurahan Cengkareng Barat (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2459k/Pdt/2014), ISSN:23949-2332, Volume 5 No. 3 2015, ditulis oleh Stella dan Hasni.

Jurnal Verstek, Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016) ISSN:23283-2343, Volume 7 No. 1 Januari-April 2019, ditulis oleh Annisa Oktaviani P & Harjono.

Jurnal Suara Hukum, Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah. ISSN:2388-23211, Volume 7 No. 4 2021 , ditulis oleh Dessy Nurkristia.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.342/Pid/2013/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung RI No: 522/K/Pid/2016

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1309 k/PID/2014.

158

Didi Mujahari, 2021

PEMENUHAN UNSUR PEMALSUAN GIRIK C DAN SPPT PBB YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn. Jkt. Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id.www.library.upnvj.ac.id.www.repository.upnvj.ac.id]